

# **ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI VLADIMIR PUTIN DALAM KEBIJAKAN ENERGI RUSIA SEBAGAI UPAYA DOMINASI DI UNI EROPA**

**YENI NOVITA**

Universitas Abdurrah  
Yeninovita18@univrab.ac.id

## ***Abstrak***

Penelitian ini mengangkat fenomena pengambilan keputusan politik luar negeri Vladimir Putin dalam kebijakan energi Rusia sebagai upaya dominasi di Uni Eropa. Peneliti mengambil sudut pandang peran individu yakni pemimpin politik terkait dengan besarnya perubahan yang terjadi di Rusia sejak kemundurannya pasca Uni Soviet runtuh. Jika ditinjau dari banyaknya perubahan kebijakan luar negeri Rusia, sebagian besar dikarenakan oleh peran individu dari pemimpin politik pada saat itu yang berpengaruh. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada satu rumusan masalah yaitu bagaimana politik luar negeri Vladimir Putin dalam menjalankan kebijakan energi Rusia sebagai upaya dominasi di Uni Eropa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dan data deskriptif yaitu menggambarkan atau menganalisa hasil penelitian. Peneliti menganalisis fenomena menggunakan kerangka teoritik idiosinkratik untuk menjelaskan mengenai karakteristik pribadi seorang pemimpin dalam membuat suatu keputusan. Margaret G. Hermann berpendapat bahwa dengan menganalisa idiosyncrasies, karakteristik, dan kepribadian, prediksi mengenai proses pengambilan keputusan sebuah kebijakan luar negeri dapat tercipta karena proses penganalisaan tersebut dapat menciptakan sebuah gambaran yang jelas tentang perilaku pengambil keputusan. Hermann dan Falkowski memberikan enam karakteristik pribadi yang merefleksikan kepribadian politik, yaitu ekspasionist, active independent, influential, mediator, opportunist, participative. Hasil analisa menggunakan teori idiosinkratik tersebut membuktikan Putin sebagai seorang pemimpin yang ekspasionist, masa kecil, pendidikan, dan pengalamannya di KGB mempengaruhi politik luar negerinya khususnya dalam kebijakan energi Rusia.

**Kata Kunci:** Vladimir Putin, Kebijakan Energi, Rusia, Uni Eropa, Idiosinkratik

## PENDAHULUAN

Setiap negara mempunyai kepentingan politik yang berbeda, baik dalam tujuan maupun sistem politik yang dianut. Politik dalam suatu negara bisa terbagi kedalam dua kategori menurut kepentingannya, yaitu politik dalam negeri dan juga politik luar negeri. Politik luar negeri Rusia merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dibahas, dahulu Rusia dikenal sebagai negara komunis yang bernama Uni Soviet, namun harus runtuh dan mengganti ideologi dan sistem politik mereka menjadi lebih demokratis dan liberal (Russian History: Russia after the Soviet Union, 2005).

Sejak keruntuhan Uni Soviet tahun 1989, Rusia perlahan membangun kembali negara mereka, baik dari segi politik maupun ekonomi. Sepeninggal kekuasaan Mikhail Gorbachev, Rusia dipimpin oleh Presiden Boris Yeltsin yang menjabat pada tahun 1991 hingga tahun 1999. Dibawah Yeltsin, Rusia fokus pada perubahan ideologi mereka dari komunis menjadi demokratis dan kebebasan ekonomi, hal ini bertujuan untuk memulihkan perekonomian Rusia yang kacau sepeninggal Gorbachev. Setelah masa jabatannya usai pada tahun 2000, Boris Yeltsin digantikan oleh presiden selanjutnya yaitu Vladimir Putin, dan sejak pergantian kepemimpinan ini bisa dikatakan sebagai titik awal kebangkitan Rusia pasca keterpurukan perang dingin berakhir. Presiden Putin menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah mengembalikan kejayaan Rusia seperti saat Uni Soviet masih berdiri, Rusia diharapkan kembali menjadi negara adidaya di dunia (Mila Karlina Mutia, 2017).

Rusia dikenal sebagai negara dengan penguasaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya sumber daya energi seperti, minyak, gas alam, logam, dan berbagai energi lainnya. Energi yang melimpah diandalkan Rusia sebagai pemasukan devisa negara. Berkat globalisasi, meningkatnya permintaan dan melonjaknya harga pasar dunia, energi menjadi andalan ekonomi Rusia dan alat paling ampuh dalam kebijakan luar negerinya di tahun 2000-an. Kebijakan dengan mengandalkan potensi energi menjadi alat diplomasi bagi Rusia untuk masuk ke wilayah politik negara-negara yang dituju merupakan kebijakan Vladimir Putin yang dikatakan paling sukses. Hal ini tentu didukung oleh jumlah energi Rusia yang besar, sehingga sangat mungkin untuk menggunakan energi sebagai salah satu cara untuk membuat ketergantungan dari negara-negara lain yang membutuhkan pasokan energi dari Rusia. Seperti yang didefinisikan Marjike, kebijakan luar negeri dibuat untuk melindungi kepentingan negara melalui interaksinya dengan negara lain. Rusia pada zaman Putin memfokuskan diri pada kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingan geopolitik dan geoekonomi. Rusia memanfaatkan wilayah, sumber daya alam dan negara tetangga untuk mencapai kepentingannya (Carnelian & Purnomo, 2013).

Setelah menjabat Putin dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada pedomannya yaitu demokrasi ala Rusia yang ia sebut sebagai kekuasaan vertikal. Kekuasaan vertikal yang dimaksud Putin adalah memusatkan kembali semua

kegiatan ekonomi ke tangan pemerintah. Dengan ini Putin berusaha untuk mengedepankan aset-aset negara terutama aset energi sebagai prioritas utama yang akan dinasionalisasikan. Putin menggunakan sumber daya alam yang dimiliki Rusia untuk menggerakkan kembali roda perekonomian yang telah berhenti. Kebijakan ini dilakukan dengan keras dan tegas oleh Putin, hal ini sebagai bentuk paranoid dari kegagalan kepemimpinan sebelumnya. Terpilihnya Vladimir Putin sebagai Presiden di tahun 2000 menggantikan Yeltsin membuat perubahan besar terhadap kebijakan energi Rusia. Di saat harga minyak dan gas mencapai nilai yang cukup tinggi, disusul meningkatnya permintaan minyak dunia, Rusia menempatkan sektor energi tidak hanya sebagai faktor penting bagi kemajuan ekonomi nasional di abad dua satu, tetapi sekaligus menjadikannya sebagai kekuatan politik dalam hubungan internasional Rusia (Alfadh, 2012). Kebijakan energi Rusia dipengaruhi oleh permintaan energi dari seluruh dunia yang semakin tahun terus meningkat, dan persaingan yang terjadi karena kebutuhan akan energi yang tidak pernah berhenti. Revolusi sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Putin memberi banyak dampak terhadap negara-negara Uni Eropa. Energi sebagai objek yang krusial terkait hubungan Rusia dan Eropa, dengan konsumsi energi yang tinggi khususnya gas di Uni Eropa membentuk interdependensi gas UE pada Rusia.

Putin telah mencurahkan waktu dan energi yang signifikan untuk mengembangkan hubungan dengan UE sejak pengangkatannya sebagai perdana menteri pada tahun 1999. Sejak tahun 2000, didorong oleh Vladimir Putin sebagai presiden baru, pemerintah Rusia berusaha untuk menambah substansi kemitraan strategis yang dideklarasikan antara Moskow dan Brussel (Lynch, 2004). Kebutuhan UE akan energi yang besar untuk menggerakkan industrinya, serta faktor kedekatan geografis membuat Putin lebih mengarahkan kebijakannya terhadap Uni Eropa. Putin memberikan perhatian khusus terhadap reformasi bidang ekonomi dengan menjadikan Rusia sebagai magnet ekonomi bagi negara-negara bekas Uni Soviet (Prabowo, 2016).

Pada November 2003, dalam sebuah wawancara dengan pers Italia, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan: "Bagi kami, Eropa adalah mitra perdagangan ekonomi utama dan mitra alami kami yang paling penting, termasuk dibidang politik. Bagaimanapun juga, Rusia tidak terletak di benua Amerika, tetapi di Eropa." (Lynch, 2004).

Pada tahun 2003 Jurnal Gas dan Minyak memperkirakan bahwa total cadangan minyak Rusia 60 miliar barel. Bahkan DeGolyer dan Mag Naughton kepala auditor cadangan minyak Rusia memperkirakan ada sekitar 150 milyar cadangan minyak yang masih dapat ditemukan atau setara 10-12 % dari total potensial minyak dunia yang belum ditemukan (Bochkarev, 2006). Bank Dunia juga mengestimasi total nilai sumber daya alam Rusia sekitar 75 triliun dolar AS. Rusia memiliki gas alam, minyak, logam berharga dengan jumlah sangat besar, menyumbang sebagian besar dari ekspor negara ini. Sampai 2012 sektor migas menyumbang 16% PDB, 52% pendapatan budget federal, dan lebih dari 70%

ekspor. Menurut Russia International Energy Data Analysis (2014) cadangan Rusia menduduki peringkat nomor 1 terbesar di dunia yakni mencapai 1680 Tcf (Trillion cubic Feet).

Posisi Rusia penting bagi keamanan energi global karena perannya sebagai penyuplai bahan bakar fosil. Menurut data dari Komisi Eropa (European Commission), 27% konsumsi minyak Eropa dan 24% konsumsi gasnya dipenuhi oleh impor dari Rusia. Beberapa negara-negara tetangga Rusia (Ukraina, Belarusia, Armenia, dan Moldova) seperti halnya negara-negara non-Eropa (terutama negara-negara Balkan Barat dan Turki) juga sangat menggantungkan suplai minyak dan gas dari Rusia (Jeronim Perovicl, et al, 2009).

Sudah satu dekade berlalu sejak Uni Soviet runtuh, Rusia telah berusaha bangkit dari kerusakan posisi internasionalnya. Rezim Rusia saat ini bermaksud untuk menggunakan sumber daya minyak dan gas negara untuk menegaskan kembali kekuatannya. Tujuan Rusia adalah menjadi energy superpower dan memainkan peran kunci geopolitik, dengan memposisikan dirinya sebagai pemasok penting untuk energi regional utama pasar. Permainan kekuatan ini didasarkan pada organisasi industri hidrokarbon yang melibatkan beberapa perusahaan besar, di mana negara memegang saham mayoritas. Perusahaan mewakili negara mengendalikan minyak dan gas untuk memenuhi anggaran negara dan perkembangan ekonomi. Perusahaan juga mendukung tujuan kebijakan luar negeri dan tindakan mereka tidak dibatasi pada sumber daya Rusia dan pasar nasional (Finon & Locatelli, 2007).

Salah satu perusahaan besar yang mendukung kebijakan luar negeri Rusia adalah Gazprom, perusahaan ini mengelola mayoritas sektor gas alam Rusia dengan total 51% saham di bawah kepemilikan pemerintah Rusia. Gazprom merupakan perusahaan besar di bawah kontrol negara yang menguasai pasar Rusia, dalam bisnis minyak maupun gas yang ada di Rusia di bawah dominasi perusahaan ini, dan dua pertiga dari pendapatan Gazprom berasal dari pelanggan Eropa. Signifikansi gas dari Gazprom di pasar Eropa mencapai 40 persen dari seluruh impor dan 26 persen dari total konsumsi (M.Khoirunnada, 2010). Dengan ini Rusia mempunyai wewenang untuk mengontrol perusahaan secara langsung. Jumlah persentase kepemilikan energi tersebut selanjutnya menjadi satu proposisi pendukung bahwa pemerintah Rusia ingin melakukan monopoli perusahaan energi dengan tujuan sebagai pilar utama stabilitas politik dan ekonomi Rusia (Price, 2018). Hal ini adalah sebuah keadaan yang telah di khawatirkan Eropa, karena berkenaan dengan strategi manipulasi pasokan energi. Saat harga energi tinggi, kebangkitan energi berbahan bakar yang dimiliki Rusia memperkenankan Moskow untuk menegaskan pengaruhnya yang lebih luas di seluruh Eropa dan Asia, bahkan bergerak agresif mengendalikan transit minyak dan gas dari timur ke barat dan upaya memblokir kekuasaan luar untuk membangun jaringan pipa melebihi kontrolnya (Jeffrey Mankoff, 2009).

## STUDI LITERATUR

Penelitian pertama yang berjudul “Strategi Vladimir Putin dalam mempertahankan dominasi Rusia di negara-negara Baltik” oleh Chikitta Carnelian, Daru Purnomo, Ardianus Bintang Hanto Nugroho, tahun 2017. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan kesesuaian kebijakan luar negeri energi Rusia pada pemerintahan Vladimir Putin dengan strategi untuk mempertahankan pengaruh di negara-negara Baltik. UE Enlargement merupakan upaya Uni Eropa untuk memperluas wilayahnya ke benua Eropa, termasuk Eropa Timur yang masih berada di bawah pengaruh Rusia. Rusia mencoba untuk mengambil kembali kendali ke negara-negara Baltik yang merupakan satu-satunya negara pasca soviet yang bergabung dengan Uni Eropa. Dengan memanfaatkan perkembangan industri energi gas alam, Rusia menggunakan strategi besar berbasis gas sebagai sumber daya alam dan ekonomi untuk memulihkan pengaruhnya di Baltik. Penulis menggunakan teori Foreign Policy Analysis untuk menganalisis kesesuaian kebijakan energi Vladimir Putin dan birokrasinya dengan grand strategy mereka untuk melihat kemungkinan tercapainya tujuan nasional Rusia untuk mempertahankan pengaruhnya di Baltik, melindungi keamanan regional, dan menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Eropa (Carnelian & Purnomo, 2013).

Penelitian kedua berjudul “Politik Energi Rusia dan Dampaknya terhadap Eropa terkait Sengketa Gas Rusia-Ukraina 2006-2009” oleh Anjar Sulastri tahun 2013. Penelitian ini membahas tentang penutupan jalur pipa gas oleh Rusia di Ukraina yang memberikan dampak signifikan terhadap kebutuhan gas dalam negeri negara-negara yang ada di Eropa Timur, yang mengimpor gasnya dari Rusia melalui Ukraina. Dan dikaitkan dengan sengketa gas Ukraina agar lebih mempertajam analisis mengenai intensitas hubungan antara Rusia dan Eropa dalam sektor energi. Karena Rusia merupakan negara yang memiliki sumber daya energi yang besar membuat Rusia menggunakan energi gas sebagai instrumen politik baru dalam upaya mengembalikan pengaruhnya yang selama ini sempat hilang khususnya di kawasan Eropa dan Ukraina. Dalam usahanya untuk memperluas pengaruh, pemerintah Rusia menggunakan cara mengontrol jaringan atau jalur pipa (control networks), hal ini mutlak dilakukan oleh Rusia di negara-negara Eropa Timur (Sulastri, 2013).

Penelitian kegiatan berjudul “Upaya Rusia Dalam Mempertahankan Pengaruh Politik di Kawasan Eropa Timur Melalui Russian Grand Gas Strategy” oleh Romi Aditama, pada tahun 2017. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan apa yang mendasari Rusia menggunakan Russian Grand Strategy untuk mempertahankan pengaruh politik di kawasan Eropa Timur. Hal ini terjadi karena adanya berbagai ancaman yang datang dari NATO dan Uni Eropa membuat Rusia melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan pengaruh. Sumber daya alam melimpah yang dimiliki Rusia membuat Rusia menggunakan sumber daya alam ini, khususnya dalam bidang energi sebagai senjata politik untuk mempertahankan pengaruh politiknya di kawasan Eropa Timur. Dengan Rusia sebagai negara yang memiliki cadangan terbesar di dunia, membuat Rusia menggunakan Russian Grand Gas

Strategy sebagai instrumen pertahanan politik Rusia. Hasil dari analisa penulis berupa, politisasi gas dalam konteks Russian Grand Gas Strategy pada akhirnya akan menjadi alat pertimbangan bagi NATO dan Uni Eropa yang seringkali melakukan infiltrasi pada setiap kasus yang terjadi di kawasan Eropa Timur. Untuk meneliti kasus ini peneliti menggunakan teori Regional Security Complex, serta menggunakan metode penulisan eksplanatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber (Romi Aditama, 2017).

Penelitian yang keempat berjudul “Kebijakan Rusia dalam Kerjasama Gas Alam dengan Tiongkok tahun 2014” oleh Tiara Rizky Pratiwi pada tahun 2018. Dari penelitian ini penulis akan menjelaskan mengapa Rusia melanjutkan kebijakannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama gas dengan Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rusia melanjutkan kebijakan luar negeri dalam kerjasama energi dengan Tiongkok dipengaruhi oleh dua faktor besar. Pertama Rusia perlu meningkatkan ekonomi dan stabilitas permintaan gas. Faktor ini terkait dengan beberapa situasi regional yang terjadi selama kerjasama berlangsung. Faktor kedua yaitu Rusia melihat bahwa adanya sebuah peluang tersembunyi di balik One Belt One Road (OBOR) yang digagas oleh Tiongkok. Kedua faktor tersebut lah yang mendorong Rusia untuk melanjutkan kerjasama gas dengan Tiongkok Pada tahun 2014. Penulis menggunakan foreign decision making theory, konsep keamanan energi untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Rusia dan proses pengambilan keputusan (Pratiwi,2018).

Penelitian yang kelima berjudul “Ketahanan Energi Rusia dan Kerentanan pasar Asia-Pasifik” oleh M. Faris Alfadh tahun 2012. Dari penelitian ini penulis mencoba menjelaskan ketahanan energi Rusia hingga dekade berikutnya, serta dampaknya terhadap terhadap ketahanan energi kawasan Asia-Pasifik. Rusia sangat penting bagi pasar energi dunia, hal ini karena Rusia memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia dan produsen minyak mentah terbesar setelah Arab Saudi. Tetapi bagi Rusia energi bukan hanya sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, tapi sebagai bentuk kekuatan politik dalam hubungan internasionalnya. Rusia memiliki ambisi untuk menjadi produsen energi terbesar di dunia, dan paling berpengaruh di pasar energi dunia, dan kawasan Asia-Pasifik menjadi penting mengingat potensi pasar yang sangat besar. Namun kebijakan energy tidak sepenuhnya berdampak positif terhadap stabilitas pasokan di pasar Asia-Pasifik. Persaingan pasar dan persaingan tidak sehat yang terjadi antar negara kawasan Asia-Pasifik akan terus meningkat seiring dengan kebijakan ketahanan energi Rusia (Alfadh, 2012).

Penelitian terakhir yang berjudul “Kebijakan Suplai Energi Gas Alam Rusia ke Tiongkok di Tahun 2014” oleh Ulfa Deniary Sabilah, pada tahun 2017. Penelitian ini memfokuskan terhadap pemaknaan kebijakan luar negeri di tengah upaya mengembangkan industri gas alam yang dilihat pada keputusannya mengeluarkan kebijakan energi Rusia melalui kegiatan suplai energi gas alam ke Tiongkok dengan memiliki SPA (sales and Purchase Agreement) antara Rusia dan Tiongkok pada 21 Mei 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rusia memiliki kepentingan terkait

suplai gas alam ke Tiongkok. Rusia menggunakan dua kapabilitas utama, kapabilitas tersebut yaitu produksi dan cadangan gas alam. Rusia juga telah mengupayakan pendekatannya guna mempengaruhi agar disetujuinya mitra baru Rusia dengan kontrak SPA 2014. Peneliti pada penelitian ini menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri, dan penulisan penelitian menggunakan penelitian kualitatif Robert E. Stake (Ulfa Deniary Sabilah, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan dalam penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010).

## **PEMBAHASAN**

### **DOKUMEN STRATEGI ENERGI RUSIA**

Tujuan dari kebijakan energi Rusia adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya energi alam secara efektif dan potensi sektor energi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mempromosikan penguatan posisi ekonomi asing negara. Strategi menentukan tujuan dan sasaran pengembangan jangka panjang sektor energi Rusia untuk periode mendatang, prioritas dan pedomannya, serta mekanisme kebijakan energi negara pada fase implementasi Strategi yang memastikan realisasi tujuan yang dinyatakan (Ministry of Energy of the Russian Federation, 2010).

Vladimir Putin dalam empat tahun pertama masa jabatannya terus menegaskan pentingnya sektor minyak dan gas dalam ekonomi Rusia, berusaha untuk secara bersamaan meningkatkan daya tarik bagi investor asing sambil meningkatkan kontrol negara Rusia. Dua dokumen terpisah yang menguraikan kebijakan energi negara telah disiapkan sejak Putin menjabat (Olcott, 2004). Pada tanggal 7 Mei 1995, Presiden Boris Yeltsin menegaskan strategi energi Rusia pasca-Soviet yang pertama yaitu "Tentang Arah Utama Kebijakan Energi dan Restrukturisasi Industri Bahan Bakar dan Energi Federasi Rusia untuk periode hingga tahun 2020". Selanjutnya pada 13 Oktober 1995, pemerintah Rusia menindaklanjuti dengan menyetujui dokumen yang dikenal sebagai "Ketentuan Utama Strategi Energi Rusia". Di bawah kepresidenan 53 Vladimir Putin, perubahan pertama terjadi pada 23 November tahun 2000, pemerintah Rusia menyetujui dokumen yang dikenal sebagai "Ketentuan Utama Strategi Energi Rusia hingga 2020". Pada September 2003 "Up to 2020" diperbaharui, dan ini adalah dokumen yang sangat rinci dan teknis yang berorientasi pada pertumbuhan produksi energi (Varol, 2013).

infrastruktur pasar energi (mekanisme pasar, kelembagaan perdagangan terbuka pembawa energi, infrastruktur transportasi Pengembangan energi) merupakan salah satu prioritas utama dari dokumen ini. Program untuk meningkatkan harga gas dan mekanisme untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi dari pertumbuhan harga energy secara keseluruhan sangat penting. Dukungan dan promosi inisiatif strategis di sektor energi menjadi dasar bagi pelaksanaan proyek-proyek energi besar di masa depan. Sebagian besar pedoman yang dinyatakan dalam Strategi Energi Rusia untuk periode hingga 2020 telah diimplementasikan dalam praktik dengan menggunakan semua mekanisme yang disediakan oleh kebijakan energi negara (Ministry of Energy of the Russian Federation, 2010).

Dua skenario pembangunan sosial dan ekonomi Rusia terletak di jantung strategi energi: Optimis dan Moderat. Skenario optimis dicirikan dengan pertumbuhan PDB 3,3 kali lebih banyak dari tingkat tahun 2000 pada tahun 2020, dengan peningkatan tujuh kali lipat investasi fisik ke dalam modal tetap untuk periode ini. Skenario moderat ditandai dengan pertumbuhan PDB 2,3 kali lebih banyak dari tahun 2000 ke tahun 2020, peningkatan modal tetap investasi fisik 3,6 kali lebih banyak untuk periode yang bersangkutan. Menurut dokumen strategi energi nasional untuk periode sampai tahun 2020, produksi gas bumi diperkirakan akan meningkat dari 598 bcm pada tahun 2005 menjadi 730 bcm pada scenario optimis dan menjadi 680 bcm pada skenario pesimis pada 2020. Dan diperkirakan akan memasok 450 m/t minyak di bawah skenario pesimis dan 520 m/t di bawah skenario optimis (Varol, 2013).

Tujuan utama dari kebijakan energi adalah untuk (Danila BACHKAREV, 2001) :

1. Ekspor sumber daya energi
2. Menarik FDI ke sektor energi nasional
3. Energi transportasi
4. Mempromosikan eksplorasi dan produksi kegiatan sektor energi bahan bakar Rusia di luar negeri
5. Meningkatkan kehadiran perusahaan Rusia di pasar luar negeri (baik di sektor hulu maupun hilir).

Menurut Leijonhielm dan Larsson, Rusia menyatakan bahwa mereka bertujuan untuk memanfaatkan kebijakan energi untuk tujuan keamanan. Ide ini terhubung dengan gagasan umum tentang keamanan dengan cara non militer untuk memperluas pengaruh Rusia di luar negeri sebagai upaya mengamankan kemerdekaannya.

Tujuan utama dari strategi energi pemerintah Putin hingga tahun 2020 adalah untuk menggunakan sumber daya energi Rusia yang besar dan industri energi bahan bakar yang kuat sebagai basis untuk memperluas kekuatan politik Rusia.

Oleh karena itu, dokumen tersebut menegaskan bahwa sumber daya energi sangat penting bagi pengaruh geopolitik negara dan politik luar negeri. Akibatnya, dokumen mengajukan gagasan dasar bahwa anugerah sumber daya Rusia sangat penting untuk keamanan energi domestiknya dan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Varol, 2013).

Setelah pemilihan kembali pada tahun 2004, Putin dipersenjatai dengan legislatif yang lebih mendukung. Di minggu-minggu pertama bangku kepresidenan, Putin mulai merampingkan pemerintahan secara umum, terkait minyak dan sektor gas telah dimodifikasi Putin selama masa jabatan pertamanya. Putin telah membawa "darah baru" dari industry minyak ke posisi kunci di pemerintahan dan administrasi presiden. Dengan kepemimpinan barunya di masa jabatan yang kedua di tahun 2004, Putin berusaha mempercepat apa yang dilihatnya sebagai reformasi sektor energy (Olcott, 2004). Termasuk memulai proses pembentukan kembali perusahaan energi milik negara di masa jabatan pertamanya, ia melangkah lebih jauh dalam menciptakan energi nasional milik negara yang dominan (Olcott, 2004).

### **Gazprom Sebagai Proyek Pribadi Putin**

Gazprom telah menjadi proyek pribadi terpenting presiden Putin. Tepat setelah berkuasa, Putin mulai mengawasi perusahaan ini. Bahkan selama kampanye pemilihan presiden tahun 2000, isu energy dan Gazprom adalah elemen kunci dalam agenda politik Putin. Pada Juni 2000, sebulan setelah pelantikannya, Putin berhasil menggantikan Viktor Chernomyrdin dengan cepat untuk rekan setim terdekatnya Dmitry Medvedev di jabatan ketua dewan. Dan pada Mei 2001 kepala Gazprom Rem Vyakhirev, yang telah mengelola perusahaan sejak didirikan pada tahun 1992, digantikan oleh Alexei Miller (Boris Nemtsov, 2008).

Gazprom adalah struktur bisnis pertama di mana Putin mulai merebut secara sistematis posisi kunci yang menunjuk orang-orangnya ke pos komando dan memberhentikan anggota tim manajemen lama. Kepemimpinan tertinggi Gazprom segera diisi dengan kenalan lama Putin sejak bekerja di pemerintahan St Petersburg. Sampai hari ini, 11 dari 18 dewan direksi yang mengelola masalah keuangan, masalah properti, manajemen perusahaan, adalah orang-orang yang pada tahun 90-an bekerja baik di Administrasi St Petersburg atau di Pelabuhan Laut OAO St Petersburg, atau di beberapa struktur komersial St Petersburg, juga di FSB. Putin mendedikasikan sebagian besar waktu kerjanya untuk memecahkan masalah fungsi Gazprom saat ini. Sebagian besar agenda pertemuan internasional dan kunjungannya ke luar negeri terkait dengan lobi berbagai proyek Gazprom (Boris Nemtsov, 2008).

Berkat strategi energi Putin, Gazprom tumbuh pesat dan bahkan menjadi aktor kebijakan luar negeri untuk Moskow. Stabilitas sektor gas tidak hanya menjadi aspek penting untuk ekspor pendapatan, namun juga penting untuk konsumsi dan kebutuhan sosial. Dampak gas alam bagi ekonomi Rusia berbeda dengan minyak,

karena gas tidak memiliki kewajiban maupun aturan dalam organisasi seperti OPEC (Varol, 2013). Oleh karena itu, Rusia hampir independen untuk menentukan harga untuk setiap pelanggan. Dengan ini Rusia berhasil menerima pemasukan besar dari perdagangan gas alam dalam satu dekade terakhir. Gazprom menyumbang sekitar 8% dari PDB Rusia, seperlima dari ekspornya dan seperlima dari kapitalisasi pasar (Ander Aslund, 2010). Rusia saat ini adalah pengeksport gas alam teratas di dunia dengan lebih dari 220 bcm pada tahun 2010 dan diikuti oleh Norwegia (99 bcm), Kanada (95 bcm), Aljazair (60 bcm) dan Qatar (57 bcm) di lima negara teratas (Varol, 2013).

### **METODE PUTIN MENGGUNAKAN ENERGI SEBAGAI ALAT DOMINASI DI UNI EROPA MELALUI GAZPROM : KEBIJAKAN HARGA, GANGGUAN PASOKAN, DAN KONTROL ASET**

Setelah Uni Soviet runtuh, Federasi Rusia terus memasok negara-negara bekas Soviet dengan energi murah. Rusia menawarkan persyaratan yang menguntungkan untuk pengiriman gas dan minyak, yang memungkinkannya untuk mengembangkan hubungan ketergantungan dengan negara ketiga dan meningkatkan pangsa pasar. Setelah membangun hubungan ketergantungan, Rusia dapat mengambil manfaat ekonomi atau politik. Caranya yaitu dengan melalui penyesuaian harga kontrak gas. Ketika sebuah negara jatuh dari dukungan politik, diskon harga gas dibalik, dan sebaliknya. Moskow mencadangkan tarif gas rendah untuk negara-negara yang dekat dengannya, seperti Ukraina, Belarus, Moldova, Armenia, dan negara-negara Baltik. Moskow mengklaim bahwa negara-negara bekas Soviet ini berada dalam lingkup pengaruh Rusia, dan menggunakan pasokan energi untuk membuat pengaruh ini terasa. Rusia mengenakan harga yang berbeda untuk negara yang berbeda. Seringkali perbedaan ini tidak dapat dijelaskan dengan kondisi ekonomi sederhana seperti jarak dan volume saja (Korteweg, 2018).

Pada Agustus 2004, Putin dalam rangka untuk mempercepat reformasi sektor energi, tarif ekspor minyak diubah agar lebih peka terhadap pasar. Ketika rencananya pertama kali diumumkan pada bulan Maret, Menteri Keuangan Andrei Kudrin mencatat bahwa ini akan memberi pemerintah Rusia tambahan \$10 juta per hari, jika minyak dijual seharga \$30 per hari barel. Keuntungan yang dihasilkan dari perubahan ini jauh melebihi tujuan awal. Perubahan pajak ekspor adalah bagian dari janji pemilu Putin untuk menaikkan pajak minyak dan gas, dan untuk menciptakan lebih banyak pendapatan yang merangsang pengembangan ekstraktif non-sumber daya sektor-sektor ekonomi.

Antara tahun 1994 hingga tahun 2004, Presiden Ukraina Leonid Kuchma memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Moskow. Dan ini memungkinkan Ukraina untuk mendapatkan diskon gas dari Gazprom. Sepanjang masa kepresidenan Leonid Kuchma, Rusia menjaga harga gas tetap beku di tingkat rendah yaitu sebesar USD 50 per 1.000 meter kubik. Sebagai perbandingan pada tahun 2001, Rusia menjual gas ke Jerman sekitar USD 79 dan USD99 per 1.000

meter kubik, ditambah biaya transportasi USD 27 (Tarr, 2010). Bukan hanya kesetiaan yang diinginkan Moskow, tetapi juga beberapa bantuan politik. Misalnya, Ukraina dan Rusia menyetujui kesepakatan Debt for fleet, di mana Kiev memberi Rusia akses ke pangkalan angkatan laut Sevastopol di Krimea dengan imbalan pembatalan 700 juta dolar AS untuk pengiriman gas di masa lalu (Korteweg, 2018).

Pada tahun 2005, parlemen Rusia telah mengadopsi resolusi bahwa negara-negara CIS, termasuk Ukraina, harus membayar harga seperti negara-negara Eropa lainnya, atau sesuai dengan harga pasar. Gazprom mengumumkan kenaikan harga tiga kali lipat untuk Ukraina, yang awalnya USD160 per tcm, dan kemudian naik menjadi USD230 per tcm. Ketika Ukraina gagal menyetujui harga yang lebih tinggi ini, Gazprom memotong pasokan gas ke Ukraina pada 1 Januari 2006, bertepatan saat puncak musim dingin (Stern, 2006). Pada 4 Januari, setelah pemotongan hari ketiga, kesepakatan tercapai dan pasokan gas dimulai lagi. Jika Ukraina memiliki hubungan politik yang lebih dekat dengan Rusia, harga yang lebih rendah dapat disepakati, dan kemungkinan pemotongan dapat dicegah (Korteweg, 2018).

Pada akhir 2008, perselisihan lain muncul, kali ini seputar utang operator jaringan gas Ukraina Naftogaz senilai USD2,4 miliar kepada Gazprom. Ekonomi Ukraina yang lemah dan dilanda korupsi tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya. Ketegangan antara Ukraina dan Rusia telah meningkat karena Yushchenko telah mendukung Georgia selama perang singkatnya dengan Rusia. Musim dingin tampaknya merupakan waktu yang tepat untuk menghukum para pemimpin yang tidak patuh di Kiev. Pada Desember 2008 Gazprom menuntut pembayaran. Pada 1 Januari 2009 krisis memuncak, Gazprom mengurangi pasokan gas ke Ukraina. Akibat Ukraina mengambil gas dari pipa transit, menyebabkan penurunan gas ke beberapa negara Eropa tengah dan timur. Pada 7 Januari 2009 Rusia menghentikan semua transit gas melalui Ukraina ke Eropa (Korteweg, 2018).

Dari kasus Ukraina dapat dilihat bagaimana cara Rusia mengendalikan sebuah negara dengan kebijakan penetapan harga pasokan energi. Jika negara mampu untuk setia dan memungkinkan untuk memberi bantuan politik untuk Rusia, maka penetapan harga energi akan diberi dengan harga rendah. Namun, jika negara itu tidak patuh maka Rusia akan menaikkan harga, bahkan mengurangi ataupun memberhentikan pasokan energi yang akan berakibat fatal kepada negara penerima seperti kasus Ukraina, bahkan negara lain di kawasan tersebut juga akan menjadi korbannya.

Putin memanfaatkan momen ini untuk mempromosikan harga baru bagi ekspor energinya kepada segenap konsumennya di Uni Eropa, terutama Ukraina dengan tujuan supaya kontrol harga gas tetap terjaga dan Rusia sebagai penghasil energi terbesar di dunia dapat memonopoli produksi dan pasokan gas secara luas demi mewujudkan kepentingan nasionalnya. Dari tindakan tersebut Putin memanfaatkan posisi Rusia sebagai aktor yang les dependen untuk penetapan harga, hal berbeda dialami oleh Uni Eropa, di mana Uni Eropa berada di posisi yang

lebih dependen yang seakan akan stabilitas tergantung pada Rusia karena apabila stabilitas industri gas Rusia goyah maka goyah pula stabilitas dengan fokus pada keamanan suplai gas (Prabowo, 2016).

Rusia sering menggunakan kekuatan energinya untuk melawan negara-negara CIS, yang terbiasa dengan harga rendah sejak zaman Soviet, sementara industri mereka sebagian besar sangat memakan energi. Menurut penelitian Swedia, Rusia menggunakan energi (minyak dan gas) sebagai pengungkit terhadap negara-negara CIS, kebijakan yang paling banyak digunakan adalah pemotongan pasokan (Oldberg, 2010). Ketika perselisihan harga dengan Gazprom meningkat, mereka dapat menyebabkan gangguan pasokan atau bahkan pemotongan. Pemotongan pasokan merupakan bentuk tekanan yang paling ekstrem, dan pemotongan yang dilakukan Gazprom berdasarkan persetujuan pemerintahan Putin (Larsson, 2006). Dampak geopolitik dari pengurangan pasokan dapat memiliki efek jangka panjang pada citra Rusia di luar negeri. Kasus semacam ini terjadi ketika Rusia percaya bahwa kepentingan strategisnya dipertaruhkan dan dapat bersifat defensif dan ofensif (Korteweg, 2018).

Pemotongan pasokan gas telah mempengaruhi Ukraina berulang kali, namun menurut Putin, pelanggan perumahan Ukraina tidak akan terpengaruh oleh pemotongan pasokan gas, karena sumber daya Ukraina sendiri akan mampu menangani ini (Larsson, 2006). Gangguan semacam ini telah menjadi bagian dari cara Rusia untuk mempengaruhi perilaku negara-negara anggota UE.

Pada tahun 2006, Rusia berhenti mengirim pasokan minyak ke kilang Mazeikiu di Lituania (Dempsey, 2006). Meskipun Moskow menyebutnya sebagai masalah teknis, namun alasan dibalik tindakan ini adalah penjualan kilang yang dilakukan ke perusahaan Polandia, bukan Rusia. Januari 2007 Gazprom memutuskan pasokannya ke Belarusia. Pemutusan pasokan kali ini dilatarbelakangi oleh kenaikan harga yang sangat drastis karena penyesuaian harga pasar dunia. Lebih dari itu, Gazprom juga memiliki keinginan untuk menguasai 50 persen jaringan pipa gas ke Belarusia. Pada tahun 2008, pasokan minyak ke republik Ceko turun, hal ini bisa dibilang sebagai tanggapan atas keputusan Praha untuk menjadi tuan rumah sistem radar anti-rudal AS. Dan penurunan ini juga disebut sebagai masalah teknis. Pada tahun 2014, ketika UE mempertimbangkan sanksi yang lebih keras terhadap Rusia, pasokan gas melalui pipa Yamal-Eropa turun sepertiga, membuat Polandia dan Jerman terpengaruh. Meskipun alasan penurunan pasokan belum diumumkan, ini menjadi pengingat bagi konsumen Eropa bahwa Rusia dapat menutup pasokan jika mereka mau. (Krajewski & Szary, 2014).

Gangguan pasokan yang dilakukan menjadi masalah bagi Rusia karena merusak citranya sebagai pemasok yang diandalkan, namun di Rusia sendiri kebijakan luar negeri Putin jarang terdengar mendapat kritikan atau sesuatu yang menjadi perhatian. (Larsson, 2006). Seperti kasus pemotongan ekspor antara Turkmenistan dan Rusia. Pipa Central Asia Center (CAC) adalah rangkaian pipa gas alam yang dikendalikan Gazprom yang membentang dari Turkmenistan ke Rusia,

melintasi Uzbekistan dan Kazakhstan. Pipa itu dibangun selama 1960-an dan 1980-an, ketika Uni Soviet ingin mengirimkan gas Turkmenistan ke Rusia dan seterusnya ke Eropa. CAC mengikat Turkmenistan ke pasar Rusia. Ketergantungan pada infrastruktur gas Rusia ini memberi Moskow pengaruh besar atas Ashgabat. Turkmenistan memegang cadangan gas alam terbesar keempat di dunia, atau sekitar 10 persen dari total global. Pada tahun 2003, Rusia dan Turkmenistan menandatangani perjanjian jangka panjang, yaitu Rusia mengimpor 40 miliar meter kubik gas alam per tahun. Gas ini sebagian besar diekspor kembali ke Eropa. Rusia berusaha memastikan bahwa tidak ada pasokan gas non Rusia yang tidak dapat dikontrolnya memasuki pasar Eropa. Bersamaan dengan itu, Rusia menggunakan kepemilikan jaringan distribusi gas Asia Tengah yang dominan untuk mempertahankan pengaruhnya atas negara-negara bekas Soviet di Asia Tengah (Korteweg, 2018).

Ketika di awal jabatannya sebagai presiden terpilih, Putin mulai mencecar oligarki yang sudah mengontrol sebagian besar kekuatan ekonomi Rusia, bahkan mengontrol politik Rusia. Setelah dilantik, Putin merencanakan jarak pada semua oligarki (Muhammad Ali Busthomi, 2010). Putin menyatakan bahwa ia dan siloviki telah memimpin negara, dan para oligarki bisa memiliki kekayaan yang didapat secara ilegal, tetapi harus menjauh dari hingar bingar politik. Ini merupakan pesan tersirat agar oligarki tunduk atau ditaklukkan. Oligarki yang taat, apalagi berbalik menjadi kawan Putin, tidak akan diganggu (Muhammad Ali Busthomi, 2010).

Putin juga menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan Eropa Barat hanya akan mendapatkan akses ke ladang minyak dan gas Rusia jika perusahaan Rusia diizinkan membeli gas perusahaan distribusi dan aset hilir lainnya di negara-negara besar Uni Eropa (Varol, 2013). Sejak energi menjadi salah satu penopang Rusia, jaringan distribusi energi berperan sebagai tulang punggung, karena melalui jaringan distribusi Moskow dapat memproyeksikan pengaruh politiknya. Melalui kepemilikan jaringan pipa pasokan, Gazprom mampu mempengaruhi pengambilan keputusan di negara-negara utama. Seringkali pembelian ini berbentuk kesepakatan Debt for Asset, di mana Rusia menukar infrastruktur pipa untuk membatalkan utang. Di bawah ini adalah daftar contoh aset Gazprom di Eropa (Korteweg, 2018).

Bagi Rusia, kepemilikan berarti menguasai infrastruktur transportasi pipa, operator serta gas yang mengalir melalui pipa. Dengan cara ini Rusia dapat mempertahankan posisi pasar monopolistiknya dan memaksimalkan pengaruh politik yang dapat ditawarkan oleh jaringan pipa. Alasan Rusia adalah ini satu-satunya cara yang dapat mengamankan pasokan yang andal. Terkadang Rusia merasa bahwa Ukraina dan Belarusia telah memeras Moskow atas ekspor energinya ke Eropa. Oleh karena itu, kontrol atas infrastruktur energi telah menjadi tujuanstrategisMoskow(Korteweg,2018).

Di UE, Gazprom memiliki saham pengendali di sejumlah operator gas dan jaringan pipa. Sama seperti penggunaan kebijakan penetapan harga sebagai alat tawar-menawar, Rusia juga telah menyesuaikan volume gas atau minyak yang

dipasoknya ketika menawar aset strategis tertentu. Dalam upayanya untuk menguasai rute ekspor minyaknya, pada Januari 2003 Rusia menghentikan pengiriman minyak ke pelabuhan Ventspils Nafta di Latvia. Dengan mencekik pasokan, Rusia berharap dapat memaksa pemerintah Latvia untuk menjual pelabuhan minyak tersebut (Tavernise, 2003). Dengan usaha keras Gazprom untuk memperbesar kepemilikannya pada jaringan dan rute ekspor terhadap minyak maupun gas alam, membuat Rusia semakin bergerak bebas untuk mengendalikan arus ekspor sebagaimana yang mereka inginkan, hal ini tentu akan memberi pengaruh yang kuat kepada Rusia di pasar Uni Eropa hingga pasar global.

Perubahan kebijakan pada awal kepemimpinan Putin dari privatisasi kemudian kembali ke nasionalisasi aset-aset negara dilakukan karena negara tidak lagi memiliki kendali yang kuat atas aset-aset tersebut ditambah lagi dengan dampak buruk dari privatisasi yaitu korupsi yang dapat menjatuhkan stabilitas ekonomi dan keamanan Rusia. Mengenai kebijakannya tentang industri gas, Putin beranggapan bahwa manajemen atas sumber daya alam Rusia terlampau penting untuk diberikan kepada bisnis swasta, dalam hal ini pemerintahan Putin mengarahkan Gazprom yang merupakan penghasil gas terbesar di Rusia sebagai stabilisator perekonomian dan keamanan Rusia (Prabowo, 2016).

## **KETERGANTUNGAN ENERGI UNI EROPA SEBAGAI BENTUK DOMINASI RUSIA**

Merlevede, Aarle, dan Schoors mengidentifikasi sejak Putin menjadi Presiden pada tahun 2000, ekonomi Rusia telah tumbuh mengesankan, dan telah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia (Varol, 2013). Pertumbuhan tersebut telah membawa perbaikan dalam standar hidup rata-rata bangsa Rusia. Selama masa kepresidenan Putin, jumlah kumulatif PDB Rusia antara tahun 1998 dan 2008 sebesar 6.94 persen (Varol, 2013).

Perombakan besar yang telah dilakukan Putin pada ekonomi Rusia, khususnya industri minyak dan gas memberikan pengembangan sumber daya produksi, transportasi dan eksploitasi yang direorganisasi di bawah kontrol langsung negara. Gazprom salah satu contoh perusahaan terbaik dunia yang merupakan proyek pribadi Putin, untuk melayani tujuan negara Rusia dalam mencapai kekuatan politik dan ekonomi. Putin telah memperkuat kontrolnya secara vertikal dalam integrasi monopoli gas. Dengan 51% saham dipegang oleh negara, Gazprom juga merupakan perusahaan internasional yang mampu bersaing dengan perusahaan minyak papan atas dunia (Finon & Locatelli, 2007).

Perombakan besar yang telah dilakukan Putin pada ekonomi Rusia, khususnya industri minyak dan gas memberikan pengembangan sumber daya produksi, transportasi dan eksploitasi yang direorganisasi di bawah kontrol langsung negara. Gazprom salah satu contoh perusahaan terbaik dunia yang merupakan proyek pribadi Putin, untuk melayani tujuan negara Rusia dalam mencapai kekuatan politik dan ekonomi. Putin telah memperkuat kontrolnya secara vertikal dalam integrasi monopoli gas. Dengan 51% saham dipegang oleh negara, Gazprom juga

merupakan perusahaan internasional yang mampu bersaing dengan perusahaan minyak papan atas dunia (Finon & Locatelli, 2007).

Norling merangkum, strategi energi Rusia dibawah Putin terdiridari tiga komponen (Varol, 2013):

1. Menegaskan kembali kontrol negara atas sektor energi dengan membubarkan perusahaan swasta
2. Pengendalian produksi gas CIS untuk konsumsi dalam negeri dan/atau re-ekspor ke Eropa
3. Mendominasi pasar Eropa dengan menekan produsen lain, mengendalikan pengiriman hilir, sambil memaksimalkan semua outlet ekspor.

Seperti yang terlihat dalam kasus hubungan Rusia dan Uni Eropa, tujuan Rusia adalah menjadi “Energy Superpower” dan memainkan peran kunci geopolitik, dengan memosisikan dirinya sebagai pemasok penting untuk pasar energi regional utama, dan dengan mengatur persaingan antar negara dan daerah untuk proses penting (Varol, 2013).

Ketergantungan bisa menjadi kerentanan dalam hubungan satu arah. Perusahaan-perusahaan Rusia telah meningkatkan kepemilikan mereka pada perusahaan energi Eropa sejalan dengan strategi energi Putin. Perusahaan Rusia tertarik untuk mengakuisisi perusahaan yang terlibat dalam logistik energi, karena perusahaan energi Rusia mengendalikan bagian-bagian strategis dari pasokan energi. Gazprom memiliki posisi yang jauh lebih kuat dalam bisnis energi Eropa, bahkan Gazprom memiliki aset perusahaan di sekitar 20 negara Uni Eropa (Liuhto, 2010).

Ekonomi yang berkelanjutan di Uni Eropa membutuhkan pasokan energi yang terus meningkat, negara-negara anggota Uni Eropa merupakan negara maju dalam bidang industri yang membutuhkan energi yang sangat besar untuk menggerakkan industrinya. Namun, zona geopolitik ini tidak memiliki persediaan energi sendiri. Rusia adalah salah satunya pemasok energi utama UE, mencakup sebagian besar impornya (Andrés, 2007).

Ketergantungan impor UE diperkirakan akan meningkat cukup tajam dalam dekade ini. Menurut Komisi Eropa (2007), ketergantungan impor energi UE mencapai 65% pada tahun 2020. Pertumbuhan ketergantungan impor tidak hanya disebabkan oleh peningkatan konsumsi energi tetapi terutama disebabkan oleh penurunan produksi gas dan bahan bakar padat di Uni Eropa. Menurut EEA (2008), pangsa Rusia melonjak dari 13% menjadi 18% pada total konsumsi energi primer Uni Eropa antara tahun 2000-2005. Hal ini karena perluasan Uni Eropa tahun 2004, sejak itu delapan negara bekas sosialis, tradisional yang sangat tergantung pada energi Rusia, bergabung dengan Uni Eropa menyebabkan konsumsi energi kian meningkat. Kemungkinan bahwa 100 juta warga UE benar-benar diberi energi oleh Rusia (Liuhto, 2010).

Ketergantungan pada energi Rusia sangat bervariasi di antara negara-negara Uni Eropa. Antonio Sánchez Andrés dalam jurnalnya yang berjudul *Russia and Europe: Mutual Dependence in the Energy Sector*, dalam mempertimbangkan pembelian gas Eropa, Antonio membedakan ketergantungan dalam tiga kelompok negara :

1. Ketergantungan rendah atau sangat rendah, yaitu negara-negara yang impor gasnya dari Rusia tidak lebih dari 15% dari total impor gas mereka. Negara yang termasuk adalah Belgia, Irlandia, Luksemburg, Belanda, Portugal, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris.
2. Ketergantungan sedang, yang mencakup 20% hingga 40% dari kebutuhan mereka terhadap gas Rusia. Ini termasuk Prancis (23,5%), Italia (31,7%) dan Jerman (40,3%).
3. Ketergantungan tinggi atau sangat tergantung yaitu, negara yang mengimpor lebih dari 50% gas mereka dari Rusia. Negara yang termasuk Austria, Republik Ceko, Yunani, Hongaria, Polandia, Rumania, Slovenia, dan Turki. Namun ada ketergantungan yang lebih ekstrim yaitu Bulgaria, Kroasia, Finlandia, Latvia, Lituania, Serbia, dan Slovakia yang mengandalkan Rusia untuk semua bahan bakar impor mereka.

Vladimir Putin juga menciptakan ketergantungan dengan membangun hubungan dekat secara sistematis dengan pemimpin politik negara-negara Eropa, seperti hubungan baiknya secara personal dengan Gerhard Schroeder yang memperkuat posisi Gazprom di EU, khususnya Jerman (Prabowo, 2016). Selain itu juga membangun interdependensi melalui pengusaha Eropa, yang bertindak atas nama negara Rusia baik dengan mengindoktrinasi opini yang menguntungkan terhadap Rusia atau bertindak sebagai agen dalam berbagai jenis transaksi terkait energi (Liuhto, 2010).

## **KESIMPULAN**

Vladimir Putin merupakan pemimpin dengan tipe expansionist yang merefleksikan kepribadian politiknya. Perjalanan hidup Putin dari kecil, hingga menjadi mahasiswa, dan sebagai mantan anggota KGB memberi pengaruh besar pada pembentukan persepsinya. Putin percaya bahwa Rusia akan tetap menjadi kekuatan besar / Great Power seperti Uni Soviet di masa lalu. Ketertarikannya pada energi di masa kuliah hingga persepsi Great Power semenjak menjadi anggota KGB menjadi sebuah dasar alasan penerapan kebijakan energi Putin di Rusia. Meskipun Putin mengambil jurusan Hukum, namun ia memiliki concern di bidang ekonomi dan energi. Ada beberapa tesis yang telah disusun Putin, dan ia menyatakan bahwa ada korelasi antara tesisnya dan kebijakan energi yang diterapkan. Aleksander Litivenko salah satu orang yang membuat Putin menjadi memiliki pemikiran bahwa geopolitik berbasis energi merupakan cara tepat bagi Rusia untuk menguasai dunia.

Tujuan utama dari strategi energi pemerintah Putin yaitu untuk menggunakan sumber daya energi Rusia yang besar dan industri energi bahan bakar yang kuat sebagai basis untuk memperluas kekuatan politik Rusia. Dalam dokumen Energy Strategy menegaskan bahwa sumber daya energi sangat penting bagi pengaruh geopolitik negara dan politik luar negeri Rusia. Rusia menggunakan energi sebagai alat dominasi di Uni Eropa. Melalui perusahaan milik negara Gazprom, Putin menerapkan beberapa kebijakan untuk tetap membuat Uni Eropa berada di bawah kontrolnya, yaitu kebijakan harga, gangguan pasokan, dan kontrol aset. Ketergantungan energi Uni Eropa sebagai bentuk dominasi Rusia. Dengan kebutuhan energi yang terus meningkat dan zona geopolitik yang tidak memiliki persediaan energinya sendiri membuat Uni Eropa mau tidak mau tetap harus bergantung kepada Rusia. Ketergantungan ini dikategorikan dalam tiga kelompok negara yaitu: ketergantungan rendah, ketergantungan sedang, dan ketergantungan tinggi.

## REFERENSI

- Ander Aslund. (2010). *Gazprom: Challenged Giant in Need of Reform*. In Ed. Andrés, A. S. (2007). *Russia and Europe : Mutual Dependence in the Energy Sector*. 2007, 1–15.
- Ardianto Elvarino. (2010). *Metodologi Penelitian untuk Public Relations*. Simbiosis Rekatama media.
- Bochkarev, D. (2006). *Russian Energy Policy During President Putin's Tenure :Trends and Strategis*. Global Market Briefings (GMB).
- Margaret G.Herman. (1980). *Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leads*. *International Studies Quarterly*, vol 4 no 1, 1–8.
- Mearsheimer, J. (2001). *The tragedy of great power politic*. Norton & Company.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Richard Sakwa. (2007). *Putin: Russia's Choice (Vol. 9)*. Routledge.
- Rosenau, J. N. (1980). *The Scientific Study of Foreign Policy*. The Free Press.
- Sergey Seliverstov. (2009). *Energy Security of Russia and the EU: Current Legal Problems*.
- Steven Lee Myers. (2003). *Putin's Democratic Present Fights His KGB past*.
- Sugiyono. (2007). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Tarr, D. G. (2010). *The Crucial Role for Competition in the Russian Gas Market : Implications for Russia and Europe*.
- Varol, T. (2013). *The Russian Foreign Energy Policy*. Egalite.
- W. Lawrence Neuman. (2000). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative*

- Approach (4 th ed). Allyn and Bacon.
- Woehrel, S. (2012). Russian energy policy toward neighboring countries. *Economic and Political Issues of Russia*, 27–50. Jurnal, Thesis, Disertasi
- Ardianto Elvarino. (2010). *Metodologi Penelitian untuk Public Relations*. Simbiosia Rekatama media.
- Bochkarev, D. (2015). *Russian Energy Policy during President Putin's Tenure: Trends and Strategies*. Global Market Briefings (GMB).
- Boris Nemtsov. (2008). *Putin and Gazprom*. 2015.
- Cahyo Fathurahman. (2019). *KEBIJAKAN ENERGI RUSIA DI ASIA TENGAH PADA MASA KEPEMIMPINAN VLADIMIR PUTIN*. 53–64.
- Carnelian, C., & Purnomo, D. (2013). Strategi Energi Vladimir Putin Dalam Mempertahankan Dominasi Rusia Di Negara-Negara Baltik. *Jurnal Cakrawala*, 2, 1–34.
- Christine Maria Masniari. (2018). Analisis Model Teori Idiosinkratik terhadap Kebijakan Luar Negeri Perdana Menteri John Howard (1996-2007) dalam Imigran Gelap di Australia. Departemen Hubungan Internasional Binus University.
- Danila BACHKAREV. (2001). *Kebijakan Energi Rusia Selama Masa Presiden Putin: Tren dan Strategi*. GMB Publishing.
- David Hoffman. (2000). *Putin's Career Rooted in Russia's KGB*". The Washington Post.
- Dempsey, J. (2006). Lithuanians suspect Russia of dirty tricks. *International Herald Tribune*.
- EIA. (2007). U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, Country Brief: Russia. European Commission Document SEC. (2007). EU Energy Policy Data.
- Evans Jr, B. (2008). *Power and Ideology: Vladimir Putin and The Russian Political System*. The Carl Beck Papers in Russia & East European Studies, 19.
- FINON, D., & LOCATELLI, C. (2007). Russian and European gas interdependence Can market forces balance out geopolitics? 33(0).
- Giovanna De Maio. (2016). *Russia's View of Ukraine after the Crisis*.
- Henry Kissinger. (1984). *Perceptions of International Politics*. Starr, H.
- Hermann, M. G. (1980). Explaining Foreign Policy Behaviour Using the Personal Characteristics of Political Leader. *International Studies* 24, 1, 1–46.
- Hill, F., & Gaddy, C. G. (2013). *Who is Mr Putin? Mr. Putin: Operative in the Kremlin*, 1–15.